

BAB II

PEMBERONTAKAN KELOMPOK HOUTHIDI DI YAMAN

Pada periode tahun 2010 sampai dengan 2016 Pemerintah Yaman disibukkan dengan beberapa peristiwa yang terjadi di negara tersebut. Mulai dari peristiwa *Arab Spring* yang membuat Presiden Yaman saat itu, Ali Abdullah Saleh untuk turun dari jabatannya setelah lebih dari 20 tahun memimpin Yaman dan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok oposisi Houthi yang mengakibatkan ibukota Yaman, Kota Sanaa direbut oleh kelompok oposisi Houthi dan mengakibatkan Pemerintah Yaman memindahkan pemerintahannya ke Kota Aden.²³ Pemberontakan kelompok oposisi Houthi yang berubah menjadi konflik besar di Kawasan Timur Tengah memiliki sejarah yang cukup panjang dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Yaman secara luas serta posisi dari kelompok oposisi Houthi dan Pemerintah Yaman dalam konflik menjadi faktor penting dalam perseteruan perang saudara tersebut.

2.1 Sejarah Konflik Yaman

Yaman merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Timur Tengah yang mengalami konflik berkepanjangan dimana pada konflik tersebut membagi dua kekuatan besar di Yaman dan Timur Tengah. Pemerintah Sah Yaman yang mendapatkan dukungan dari Arab Saudi dan sekutunya harus berhadapan dengan kelompok oposisi Houthi yang

²³ Nyolinda Puji Rahayu and Nabil Ahmad Fauzi, "Intervensi Militer Arab Saudi Terhadap Pemberontak Al Houthi Dalam Krisis Yaman Periode 2015-2018," *Balcony* 4, no. 1 (2020): 25–37, <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/217>.

mendapatkan dukungan dari Iran. Kedua kekuatan besar tersebut memperebutkan posisi kekuasaan di Yaman dengan ideologi mereka masing-masing, Pemerintah Yaman yang menganut paham Sunni dan kelompok oposisi Houthi yang menganut paham Syiah.²⁴ Konflik yang awalnya hanya berskala lokal perlahan menjadi konflik yang besar dan mendapatkan perhatian dari negara-negara besar di dunia. Konflik Yaman telah menjadi konflik dengan skala internasional yang melibatkan aktor-aktor negara lain ke dalamnya.

Pada abad ke-19 Masehi, negara Yaman masih terbagi menjadi dua negara yang sangat berbeda dengan Yaman Utara yang merupakan salah satu bagian dari kekaisaran Ottoman dan Yaman Selatan yang menjadi bagian dari koloni Inggris Raya sejak tahun 1839. Negara Yaman masih terbagi sampai pada abad ke-20 Masehi dimana Kekaisaran Ottoman mengalami keruntuhan pada tahun 1918 dengan status Yaman Utara pada saat itu menjadi negara republik yang merdeka dengan nama Republik Arab Yaman, berbeda dengan Yaman Selatan yang masih menjadi bagian dari Inggris Raya. Pada tahun 1967 koloni Inggris Raya resmi meninggalkan Yaman Selatan dan Yaman Selatan menjadi negara dengan nama Republik Demokratik Rakyat Yaman. Pada tahun 1990 Yaman Utara dan Yaman Selatan bergabung dan menjadi satu negara utuh dengan nama Republik Yaman.²⁵

²⁴ Habib Akbar Nurhakim Fahrudin, *Op. Cit.*, hal. 8.”

²⁵ Department of State United State of America Office of The Historian, “A Guide to the United States’ History of Recognition, Diplomatic, and Consular Relations, by Country, since 1776: Yemen,” n.d., <https://history.state.gov/countries/yemen>.

Konflik yang terjadi di Yaman sudah dimulai sejak tahun 1960-an sampai tahun 1970-an ketika Yaman masih menjadi dua negara yang berbeda, yaitu Yaman Utara dan Yaman Selatan dimana pada saat itu konflik yang terjadi masih hanya sekedar konflik perbedaan ideologi pemahaman dan skala konflik tersebut masih belum besar karena adanya kekuatan besar dari Arab Saudi dan Mesir dan juga masih adanya pengaruh dari Inggris sebagai negara yang menduduki Yaman pada masa itu. Pada tahun 1990 Yaman Utara dan Yaman Selatan bergabung menjadi satu negara utuh setelah berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1989, namun terjadi percikan gejolak konflik yang terjadi antara Yaman bagian Utara dan Yaman bagian Selatan sehingga Presiden Saleh yang pada masa itu menjabat memutuskan untuk mengirim pasukan bersenjata agar konflik saudara tidak melebar lebih luas.²⁶

Konflik Yaman mulai memanas lagi setelah peristiwa *Arab Spring* yang terjadi di beberapa negara di Timur Tengah yang memicu kelompok oposisi Houthi di Yaman untuk melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Yaman yang pada masa itu dipimpin oleh Presiden Ali Abdullah Saleh. Pada konflik tersebut juga hadir Arab Saudi sebagai pendukung Pemerintah Sah Yaman dan menganggap bahwa Yaman merupakan wilayah yang penting di Kawasan Timur Tengah. Arab Saudi tidak sendirian dalam keterlibatan mereka dalam konflik Yaman karena beberapa negara besar di

²⁶ United Nations Foundation, "YEMEN: A BRIEF BACKGROUND," n.d., <https://unfoundation.org/what-we-do/issues/peace-human-rights-and-humanitarian-response/yemen-a-brief-background/>.

Barat turut andil secara tidak langsung di konflik Yaman dimana mereka memberikan bantuan untuk Arab Saudi sebagai negara yang punya nilai di mata negara-negara Barat.²⁷

Peristiwa *Arab Spring* yang terjadi di Kawasan Timur Tengah pada tahun 2010 menjadi salah satu pemicu kembali pergolakan protes kepada pemerintahan di Yaman. Pergerakan protes yang terjadi di Yaman dipengaruhi oleh negara lain yang memiliki kepentingan untuk mengendalikan sektor ekonomi dan keamanan di Yaman karena negara-negara asing tersebut mempertimbangkan bahwa keamanan nasional Yaman mempunyai kaitan erat dengan keamanan regional pada Kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, negara-negara asing tersebut memiliki hasrat untuk mengendalikan Yaman di balik layar.²⁸

Kondisi Yaman pada saat peristiwa Arab Spring dalam keadaan buruk. Hal tersebut terjadi dua faktor, politik dan sosial-ekonomi. Pada sektor politik Yaman menganut sistem republik dengan jumlah partai banyak, meskipun demikian kondisi pemerintahan Yaman pada masa sebelum *Arab Spring* sangat kuat karena tidak adanya pergerakan perlawanan yang serius dari pihak oposisi. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Ali Abdullah Saleh untuk membuat sebuah amandemen konstitusi yang memungkinkan seorang presiden untuk tetap menjabat sampai pada anaknya

²⁷ Tom Walsh, *The Forgotten War Multipolar Support for the Saudi-Led Coalition in Yemen, in China, Russia, and the USA in the Middle East*, 1st ed. (Routledge, 2023), 17.

²⁸ Adeb Al Tamimi, *Arab Spring in Yemen: Causes and Consequences*, *Quarterly Bi-Lingual Research Journal* 7, no. 28 (2020): 59–63, https://www.researchgate.net/publication/353827749_ARAB_SPRING_IN_YEMEN_CAUSES_AND_CONSEQUENCES.

yang menggantikan dia sebagai presiden baru. Hal tersebut memicu amarah masyarakat Yaman dan terjadilah gelombang protes besar yang dimulai pada tahun 2011. Gelombang protes yang terjadi di Yaman membuat Pemerintah Yaman melakukan upaya penekanan untuk meredam para pengunjuk rasa dengan kekerasan dan penindasan oleh aparat. Kejadian tersebut menjadi faktor utama peristiwa *Arab Spring* yang terjadi di Yaman menuju puncak konflik.²⁹

Sektor sosial-ekonomi di Yaman juga menjadi alasan posisi Pemerintah Yaman selama peristiwa *Arab Spring* semakin terpojok. Kondisi masyarakat Yaman yang mengendaskan serta menipisnya sumber minyak dan air menjadi dua faktor besar dalam pergolakan demonstrasi kepada Pemerintah Yaman. Selain itu terdapat peran dari sosial media dalam aksi unjuk rasa dimana sosial media berperan dalam koordinasi antar para peserta pengunjuk rasa dan menjadi sarana informasi kepada masyarakat lokal Yaman dan masyarakat global dalam meningkatkan kesadaran akan apa yang terjadi di Yaman.³⁰

Pada tahun 2012 pergantian pemimpin Yaman terjadi karena desakan dari rakyat Yaman dimana Presiden Ali Abdullah Saleh mengundurkan diri setelah 33 tahun menjabat dan digantikan oleh Presiden Abdur Rabbuh Mansur Hadi dimana gejolak konflik di Yaman masih memanas dan menganggap Abdur Rabbuh Mansur Hadi sebagai orang dari

²⁹ Ibid., hal. 23.

³⁰ Ibid., hal 23.

Ali Abdullah Saleh. Kondisi sosial politik yang tidak stabil dimanfaatkan oleh kelompok oposisi Houthi untuk melakukan perlawanan dan terjadilah pertempuran antara Pemerintah Yaman dan kelompok oposisi Houthi pada tahun 2014.³¹

Konflik yang terjadi di Yaman bisa dibilang konflik dengan tempo naik turun dengan skema konflik yang berbeda. Dalam kurun tahun 1924-2024, tercatat terdapat sekitar sepuluh konflik yang terjadi di Yaman dengan beberapa diantaranya memiliki latar belakang konflik yang sama. Dimulai dari tahun 1934 dimana terjadi perang Saudi-Yaman, kemudian pada tahun 1962 terjadi perang saudara di Yaman Utara dan pada tahun 1986 perang saudara juga meletus di Yaman Selatan. Pada tahun 2009, konflik kembali pecah di kawasan yaman selatan akibat dari pemerintah Yaman yang menggunakan tindakan kekerasan sipil kepada para pendemo yang menyuarakan ketidakadilan pemerintah Yaman, kemudian konflik tersebut kembali memanas pada tahun 2014 dengan keterlibatan kelompok Syiah Houthi yang melakukan perlawanan dengan pemerintah Yaman.³²

Kelompok Syiah Houthi merupakan sebuah kelompok oposisi yang memiliki basis operasi di wilayah Yaman bagian utara dimana mereka mendeklarasikan diri sebagai Ansar Allah atau Pendukung Tuhan yang menjadikan setiap pergerakan mereka merupakan jihad di jalan Allah.

³¹ Firmanda Taufiq and Lalu Wahyu Putra Utama, *Hegemoni Amerika Serikat Terhadap Arah Kebijakan Arab Saudi Dalam Konflik Yaman Pasca Arab Spring 2011-2017*, 2021, <http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc462604/.pdf>.

³² Isa Blumi, *Speaking above Yemenis: A Reading beyond the Tyranny of Experts*, *Global Intellectual History* 6, no. 6 (2021): 990–1014, <https://doi.org/10.1080/23801883.2019.1699332>.

Sebelum menjadi Houthi, kelompok ini bernama kelompok Zaidis yang diambil dari nama imam kelima kelompok mereka, yaitu Zaid bin Ali yang merupakan cucu dari Husein bin Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya Zaid bin Ali melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Umayyah pada tahun 740 Masehi karena Zaid bin Ali merasa bahwa pemerintahan Khalifah Umayyah pada masa itu merupakan pemerintahan yang korupsi dan Zaid bin Ali percaya bahwa imam atau pemimpin yang paling benar harus memiliki darah keturunan Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelompok Zaid mulai berkembang dan menjadi sebuah negara yang berdiri di Yaman Utara pada tahun 893 Masehi.³³

Kelompok Houthi modern dibentuk pada tahun 2004 di wilayah Saadah yang berada di Yaman Utara dan menjadikan wilayah tersebut sebagai wilayah kekuasaan mereka. Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman telah melakukan peperangan enam kali pada kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Kelompok Houthi juga semakin menguatkan posisi mereka dikarenakan adanya sentimen anti-pemerintahan yang datang dari masyarakat Yaman Utara yang merasa diabaikan oleh Pemerintah Yaman. Kelompok Houthi mengambil sikap sebagai kelompok dengan paham anti-Amerika dan anti-Zionis.³⁴

Konflik yang terjadi antara pemerintah Yaman dan kelompok oposisi Houthi mulai muncul pasca tragedi serangan WTC pada tanggal 11

³³ Jeremy M. Sharp, *Yemen: Civil War and Regional Intervention, Key Congressional Reports for September 2019: Part III*, 2020, 309–37.

³⁴ *Ibid.*, hal. 26.

September tahun 2001. Salah satu faktor penyebab konflik antara Pemerintah Yaman dan Kelompok Houthi adalah pernyataan dari Pemimpin Yaman saat itu, Presiden Ali Abdullah Saleh yang mendukung program dari Amerika Serikat mengenai perlawanan terhadap terorisme, sehingga hubungan antara Amerika Serikat dan Yaman menjadi dekat dan mengakibatkan kelompok Houthi memberontak dan menginginkan kemerdekaan dari Pemerintah Yaman karena mereka menilai Pemerintah Yaman lebih memihak ke Amerika Serikat.³⁵

Hubungan konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi kembali memanas pada tahun 2004 setelah peristiwa pembantaian Hussein Al-Houthi. Kedua kubu saling melempar tuduhan keras kepada kubu lawan. Pemerintah Yaman yang berpusat di wilayah selatan Yaman menuding Al-Houthi ingin mengubah sistem pemerintahan Yaman yang awalnya demokrasi menjadi Imamah, sedangkan kubu Houthi yang mendapatkan dukungan dari penduduk wilayah Yaman utara menuding Pemerintah Yaman telah melakukan tindakan diskriminasi sosial dan ekonomi terhadap penduduk Yaman yang berada di wilayah utara. Konflik terus berlanjut dan menjadi konflik ideologi perspektif agama Islam antara Pemerintah Yaman yang beraliran Sunni dengan kelompok oposisi Houthi yang beraliran Syiah.³⁶

³⁵ Indra Sutrisna and Saiman Pakpahan, *UPAYA DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MELINDUNGI RAKYAT YAMAN PADA REVOLUSI RAKYAT YAMAN TAHUN 2011*, *Urnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, no. 1 (2017): 1–9, <https://www.neliti.com/publications/131907/upaya-dewan-keamanan-pbb-dalam-melindungi-rakyat-yaman-pada-revolusi-rakyat-yama#cite>.

³⁶ Ibid.

Berbagai peristiwa yang terjadi di Yaman bukan sepenuhnya dilakukan oleh kelompok Houthi, namun beberapa peristiwa tersebut dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan aksi seperti yang pada peristiwa *Arab Spring* yang menjadi titik balik pergerakan kelompok oposisi karena Pemerintah Yaman yang terpojok oleh para pengunjuk rasa dan masyarakat dunia yang tertuju pada mereka. Selain itu negara-negara asing juga memasuki konflik dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan negara mereka sendiri. Dengan berbagai permasalahan yang menimpa Pemerintah Yaman, kelompok oposisi Houthi disisi lain berhasil merebut Ibukota Yaman, Sanaa dari Pemerintah Yaman pada tahun 2014 dan memaksa pemerintahan negara Yaman yang dipimpin oleh Abdur Rabbuh Mansur Hadi untuk berpindah ke kota Aden di wilayah selatan Yaman.³⁷

2.2 Pemberontakan Houthi

Kondisi Yaman yang kacau balau selama masa peristiwa Arab Spring sampai pada masa setelah pandemi COVID-19 berakhir masih terdapat satu permasalahan utama dalam diri internal negara Yaman, yaitu konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dengan kelompok oposisi Houthi. Seperti telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kelompok oposisi Houthi merupakan kelompok ekstremis yang berasal dari wilayah Saadah yang berada di wilayah utara Yaman. Kelompok Houthi

³⁷ Thomas Juneau, *How War in Yemen Transformed the Iran-Houthi Partnership*, *Studies in Conflict and Terrorism* 47, no. 3 (2024): 278–300, <https://doi.org/10.1080/1057610X.2021.1954353>.

merupakan versi pembaruan dari kelompok Zaidi dimana kedua kelompok tersebut sama-sama menganut ajaran Syiah.³⁸ Kelompok Houthi berdiri pada tahun 2004 dan mendapatkan nama tersebut dari salah satu tokoh penting Zaidi, Hussein Badreddin al-Houthi yang terbunuh pada tahun 2004.

Hussein Badreddin al-Houthi merupakan seorang revolusioner sekaligus pemimpin dari pergerakan masyarakat Yaman di Utara dalam menentang Pemerintah Yaman pada masa Ali Abdullah Saleh setelah Pemerintah Yaman yang seakan-akan membiarkan campur tangan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat di Yaman dan mengutuk keras invasi dari Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2004. Pada awalnya kelompok Houthi masih menamakan diri mereka As-Shabab Al-Mukminin yang memang pada dasarnya dibentuk sebagai kelompok oposisi dari Pemerintah Yaman pada saat itu, namun nasib Hussein Badreddin Al-Houthi berakhir tragis setelah dia dibunuh oleh tentara Yaman di tahun 2004. Melihat hal tersebut, para simpatisan Al-Houthi mengganti nama kelompok mereka menjadi kelompok Houthi sebagai bentuk penghormatan mereka atas orang yang mereka anggap sebagai pahlawan mereka.³⁹

Kelompok oposisi Houthi terbentuk karena adanya stigma dari komunitas Syiah Zaidi yang mendiami wilayah utara Yaman yang merasa Pemerintah Yaman mengucilkan komunitas masyarakat mereka dan merasa

³⁸ Maria-Louise Clausen, "Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi Conflict," *Small Wars & Insurgencies* 31, no. 4 (2020): 918–29, <https://doi.org/10.1080/09592318.2020.1744217>.

³⁹ Mohammed Almahfali and James Root, "How Iran's Islamic Revolution Does, and Does Not, Influence Houthi Rule in Northern Yemen," *Sanaa Center For Strategic Studies*, no. May (2020), <https://sanaacenter.org/publications/analysis/9050>.

ketidakadilan dari Pemerintah Yaman sehingga memunculkan rasa tidak puas akan pemerintahan pusat Yaman, dan faktor tersebut menjadi pemicu utama dari pergerakan kelompok Houthi sampai sekarang. Hal tersebut semakin diperparah dengan faktor keagamaan dimana Pemerintah Yaman yang cenderung beraliran Sunni sedangkan komunitas Syiah Zaidi yang jelas beraliran Syiah menjadikan perang ideologi agama dan berujung pada perbedaan pandangan dalam banyak hal, termasuk dalam sektor politik.⁴⁰

Tidak semua penganut Syiah Zaidi bergabung ke kelompok Houthi dan kelompok Houthi juga membuka diri merekrut anggota dari penganut agama lain di Yaman. Role model dari kelompok Houthi adalah pemerintahan Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini karena mereka merasa Khomeini sebagai sosok yang pemberani dalam melawan pengaruh barat di Kawasan Timur Tengah dan kelompok Houthi berambisi untuk menjadikan Yaman sebagai negara yang mengikuti Iran sebagai negara moderat yang melawan pengaruh barat, bukan menerimanya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah sah Yaman pada masa itu. Meskipun menjadikan Iran sebagai role model negara mereka, namun pemahaman ajaran Syiah mereka sangat berbeda karena kelompok Zaidi bukan termasuk kelompok Syiah yang menganut prinsip Syiah Dua Belas seperti konsep imam mahdi versi Syiah di Iran dan adanya “Imam Tersembunyi”. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi kelompok Houthi untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Yaman karena visi misi mereka dalam bidang

⁴⁰ Ibid., hal. 33.

politik sama, salah satunya yaitu melawan pengaruh barat di Kawasan Timur Tengah.⁴¹

Perkembangan konflik yang terjadi antara kelompok oposisi Houthi dan Pemerintah Yaman terus meningkat seiring waktu, namun Pemerintah Yaman berusaha untuk meredam konflik dengan kelompok Houthi agar konflik tersebut tidak meluas, seperti melakukan gencatan senjata. Meskipun pada akhirnya usaha Pemerintah Yaman tetap berakhir gagal karena tidak ada kesepakatan akhir antara kedua kubu. Peristiwa Arab Spring yang melanda Kawasan Timur Tengah, khususnya Yaman pada tahun 2011 membuat pergerakan kelompok Houthi untuk melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Yaman semakin luas dan mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat Yaman, terlebih lagi setelah revolusi Arab Spring di Yaman yang berhasil membuat Ali Abdullah Saleh untuk turun dari jabatannya sebagai pemimpin Yaman semakin memperjelas kesempatan untuk kelompok Houthi mencapai tujuan mereka.⁴²

Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi terus berlanjut setelah mereka berhasil merebut ibu kota Yaman, Sanaa pada tahun 2014 akhir dan menjadi titik baru dalam pergerakan mereka dalam menguasai Yaman. Akibat dari direbutnya kota Sanaa oleh kelompok Houthi, Pemerintah Yaman yang pada saat itu dipimpin oleh Abdur Rabbuh Mansur Hadi untuk mengungsi ke wilayah lain. Perebutan kota Sanaa oleh

⁴¹ Ibid., hal 33.

⁴² Adeb Al Tamimi, *Op. Cit.*, hal. 23.”

kelompok Houthi juga mendapatkan kecaman dari dunia internasional, khususnya pihak-pihak yang mendukung Pemerintah Yaman dan Arab Saudi merespon hal tersebut dengan melakukan intervensi militer ke Yaman. Kelompok Houthi yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah Iran melalui pengiriman logistik dan bantuan finansial serta militer membuat Pemerintah Arab Saudi dan sekutunya untuk semakin gencar menyerang Houthi melalui operasi militer mereka dengan tujuan menekan kelompok oposisi Houthi melalui serangan darat dan udara.⁴³

Pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi terhadap Pemerintah Yaman membuat Pemerintah Yaman melakukan berbagai upaya untuk meredam hal tersebut, salah satunya dengan melakukan kebijakan luar negeri yang efektif. Pergerakan Pemerintah Yaman yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi maupun melakukan kontak dengan PBB untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah mereka merupakan beberapa contoh upaya Yaman melalui kebijakan luar negeri yang mereka ambil sebagai bentuk penanganan mereka dalam melawan kelompok oposisi Houthi yang semakin kuat dan pengaruhnya yang semakin meluas. Selain itu, hubungan antara Pemerintah Yaman dan Pemerintah Iran juga berhubungan dalam kondisi konflik yang terjadi di Yaman karena perbedaan sikap dari kedua negara yang juga akan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang akan diambil oleh Yaman.

⁴³ Peter Salisbury, "Yemen and the Saudi – Iranian 'Cold War,'" *Middle East and North Africa Programme*, no. February (2015): 13.

2.3 Posisi Kelompok Houthi dan Pemerintah Yaman dalam Konflik

Kelompok Houthi yang menganut ajaran Syiah memiliki kedekatan khusus dengan Iran yang menjadi pusat Syiah di dunia. Kelompok Houthi juga menjadi salah satu mitra atau sekutu non-negara terkuat Iran pada tahun 2021 dengan Pemerintah Iran yang membantu kelompok oposisi Houthi dalam persenjataan mereka seperti misil dan drone untuk digunakan sebagai alat militer kelompok Houthi. Disisi lain, Pemerintah Yaman yang menganut pemahaman Islam Sunni mendekati ke kubu Arab Saudi yang merupakan kekuatan negara Islam Sunni terbesar di Kawasan Timur Tengah. Berbeda dengan Pemerintah Yaman yang tunduk dengan keputusan Arab Saudi sebagai sekutu terkuat mereka, kelompok oposisi Houthi berdiri sejajar dengan Pemerintah Iran sebagai sebuah rekan seperjuangan. Pemerintah Yaman menganggap kelompok Houthi sebagai rekan yang harus didukung penuh karena memiliki musuh yang sama, yaitu Arab Saudi dan Yaman sebagai sekutu Arab Saudi. Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Iran untuk merangkul kelompok Houthi sebagai rekan seperjuangan yang sejajar menuai hasil, dimana pada tahun 2015 Pemerintah Arab Saudi yang memfokuskan kekuatan militer mereka pada saat itu kepada konflik yang terjadi di Yaman sehingga membuat keuangan Pemerintah Arab Saudi mengalami kerugian yang cukup besar, berbeda dengan kondisi keuangan Pemerintah Iran yang relatif aman karena mereka

hanya bergerak secara tidak langsung dengan membantu kelompok Houthi.⁴⁴

Konflik yang terjadi di Yaman yang pada awalnya hanya merupakan konflik lokal dengan kelompok Houthi yang bergerak sebagai oposisi bagi Pemerintah Yaman menjelma sebagai konflik regional yang mencakup dua kekuatan besar di Kawasan Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran. Dua negara yang juga sudah menentukan sikap mereka dalam konflik yang terjadi di Yaman dengan Arab Saudi yang berpihak pada Pemerintah Yaman sebagai penganut pemahaman Sunni dan Iran mendukung kelompok Houthi yang menganut ajaran Syiah. Baik Arab Saudi dan Iran merupakan dua negara besar yang saling beradu kekuatan mereka untuk menguatkan pengaruh mereka di Kawasan Timur Tengah.⁴⁵ Persaingan perebutan pengaruh antara Arab Saudi dengan Iran bukan hanya sekedar mengenai pemahaman ajaran Islam saja, akan tetapi persaingan mereka juga menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan mereka sebagai dua negara besar di Kawasan Timur Tengah.

Awal mula terjadinya keikutsertaan Arab Saudi dan Iran dalam konflik antara Pemerintah Yaman dengan kelompok oposisi Houthi terjadi karena Pemerintah Arab Saudi yang melakukan intervensi militer ke Yaman pada tahun 2015 sebagai bentuk dukungan mereka terhadap Pemerintah Yaman yang pada saat itu dipimpin oleh Abdur Rabbuh Mansur Hadi.

⁴⁴ Thomas Juneau, *Op. Cit.*, hal 32.”

⁴⁵ Peter Salisbury, *Op. Cit.*, hal 36.

Pemerintah Arab Saudi melakukan penyerangan secara besar-besaran dengan menyerang dari daratan, lautan, dan udara dan melakukan blokade besar untuk menutup pintu masuk bagi bantuan untuk kelompok Houthi. Hal tersebut bukan hanya berdampak bagi kelompok Houthi saja, namun masyarakat Yaman juga mengalami kerugian besar dengan banyaknya korban dari masyarakat sipil Yaman dan terhambatnya suplai kebutuhan masyarakat karena adanya blokade oleh Arab Saudi dan koalisi yang mereka pimpin.⁴⁶

Iran sebagai negara yang beraliran Syiah melihat apa yang terjadi di Yaman pada saat peristiwa *Arab Spring* terjadi dan membuat Yaman menjadi kacau. Pemerintah Iran kemudian secara resmi mendukung kelompok Houthi dan membantu kelompok tersebut melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Yaman. Adanya perlawanan besar tersebut membuat Pemerintah Yaman melalui presiden Abdur Rabbuh Mansur Hadi meminta bantuan ke Pemerintah Arab Saudi secara langsung dan intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi dan koalisinya merupakan jawaban dari Arab Saudi sebagai jawaban untuk bantuan yang diminta oleh Pemerintah Yaman. Pemerintah Arab Saudi memiliki misi tersendiri dalam intervensi militer yang mereka lakukan di Yaman, yaitu sebagai bentuk pertahanan diri untuk negara mereka sendiri dan regional karena secara geografis Arab Saudi bersebelahan langsung dengan Yaman dan posisi Yaman yang cukup

⁴⁶ Ahmad Sholihul Hadi et al., *FAKTOR PENDORONG INTERVENSI MILITER ARAB SAUDI DALAM KONFLIK YAMAN*, *Interpedence Journal of Internatioanal Studies* 4 (2023): 14–25.

strategis di Kawasan Timur Tengah untuk banyak sektor yang membuat Pemerintah Arab Saudi melakukan intervensi militer agar konflik Yaman tidak semakin membesar dan merusak stabilitas regional di Kawasan Timur Tengah.⁴⁷ Selain itu adanya perbedaan ideologi antara Arab Saudi yang menganut Sunni dan Iran yang menganut paham Syiah menjadi salah alasan mengapa konflik yang terjadi di Yaman menjadi semakin mendalam dan baik Pemerintah Yaman dan kelompok oposisi Houthi sama-sama telah menentukan posisi mereka dalam konflik.

2.4 **Kondisi Sosial Masyarakat Yaman dalam Konflik**

Masyarakat sipil Yaman menjadi korban dari konflik yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok oposisi Houthi. Keterlibatan pihak luar seperti Arab Saudi dan Iran membuat kondisi masyarakat Yaman semakin mengkhawatirkan. Penutupan Bandara Sanaa pada tahun 2016 akibat intervensi militer dari Arab Saudi membuat masyarakat Yaman terperangkap penuh dalam konflik karena dengan ditutupnya bandara maka akses banyak sektor di Yaman menjadi mati seperti pada sektor kesehatan dan sektor pangan karena Yaman masih bergantung pada impor. Pada tahun 2015, *Action on Armed Violence* atau AOAV mencatat jumlah kematian dan luka-luka dari masyarakat sipil Yaman yang mencapai angka 1.037 korban dari jumlah total 1.104 korban yang terkena penggunaan senjata mortir, roket, dan peluru artileri. Lebih lanjut AOAV juga mencatat masyarakat

⁴⁷ Ibid., hal 34.

sipil Yaman yang terkena serangan alat peledak improvisasi atau IED sebanyak 774 korban dari total korban 848. Masyarakat sipil Yaman juga mendapatkan serangan dari udara melalui rudal dan bom yang diluncurkan dari pesawat militer dengan AOAV mencatat total kematian dan luka-luka yang mencapai 3.287 korban dan sebagian besar korban merupakan masyarakat sipil biasa.⁴⁸

Tabel 2. 1 *Jumlah Korban akibat serangan bersenjata di Yaman pada tahun 2015*

Jumlah Korban (Total dan Masyarakat Sipil)	Serangan Penyebab
1.104 (1.037 korban masyarakat sipil)	Penggunaan senjata mortir, roket, dan peluru artileri
848 (774 korban masyarakat sipil)	Penggunaan alat Peledak Improvisasi (IED)
3.287	Serangan udara melalui rudal dan bom dari pesawat militer

Sumber: *Robert Perkins, 2015*⁴⁹

Kondisi sosial masyarakat sipil Yaman juga mengalami dampak dari konflik antara Pemerintah Yaman dan kelompok Houthi. Dalam sektor pendidikan tercatat ada sekitar 12.000 dari total jumlah sekitar 14.400 sekolah yang ditutup di Yaman dan sekitar 2.600 sekolah hancur karena konflik yang berkepanjangan pada saat itu. Kondisi masyarakat sipil yang masih hidup juga mengkhawatirkan dimana lebih dari 15 juta masyarakat

⁴⁸ Robert Perkins, "State of Crisis : Explosive Weapons in Yemen," 2015, <https://aoav.org.uk/wp-content/uploads/2015/09/State-of-Crisis.pdf>.

⁴⁹ Ibid.

Yaman tidak memiliki akses memadai untuk air bersih dan sanitasi karena sistem akses untuk kebutuhan tersebut telah hancur karena terkena bom. Jutaan masyarakat Yaman juga mengalami kelaparan dan membutuhkan makanan yang layak. Wabah juga menyerang para pengungsi konflik Yaman pada tahun 2017 tercatat jumlah korban mencapai 956.000 kasus kolera yang ditemukan dengan sebagian besar dialami oleh anak-anak dan lebih mengesankan lagi bahwa diperkirakan lebih dari 50.000 anak korban konflik Yaman saat itu akan meninggal dunia karena faktor penyakit dan kelaparan yang melanda.⁵⁰

Yaman merupakan salah satu negara termiskin di Kawasan Timur Tengah dengan perkiraan 65 persen masyarakat Yaman hidup dalam kemiskinan, hal tersebut juga diperparah dengan 32 persen masyarakat Yaman yang mengalami kelaparan karena akses makanan yang ada tidak ada. Selain itu adanya kesenjangan antara masyarakat yang tinggal dipedesaan dan dipedesaan dimana jumlah masyarakat yang mengalami rawan pangan jauh lebih banyak di pedesaan berkali-kali lipat daripada di perkotaan. Sektor ekspor minyak Yaman juga mengalami penurunan yang cukup memprihatinkan. Pada tahun 2011 terdapat jumlah peningkatan masyarakat miskin dan rawan pangan karena sebagian masyarakat Yaman masih mengandalkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup pada saat itu.⁵¹

⁵⁰ Hadil Mohamed, Moosa Elayah, dan Lau Schuplen, *Yemen between the Impact of the Climate Change and the Ongoing Saudi-Yemen War: A Real Tragedy*, no. November (2017): 11.

⁵¹ Ibid., hal 40.

Pada bulan Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa 2,3 juta kasus masyarakat Yaman yang mengalami kolera dan menjadi salah satu wabah penyakit terbesar dalam sejarah dunia kesehatan. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada bulan Maret 2020 terjadi wabah pandemi yang melanda seluruh dunia, COVID-19 dan membuat seluruh penjuru dunia mengalami kesulitan. Yaman merupakan salah satu negara yang sangat berdampak akan adanya pandemi COVID-19, terlebih Yaman juga mengalami konflik internal yang terjadi antara Pemerintah Yaman dan kelompok oposisi Houthi. Pandemi COVID-19 dan konflik di Yaman menjadi pukulan telak bagi masyarakat Yaman karena *International Crisis Group* atau ICG telah melaporkan bahwa 24 juta dari total 28 juta masyarakat Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan pada saat pandemi COVID-19 terjadi, terdapat juga 112.000 lebih orang tewas selama masa konflik perang berlangsung.⁵²

Berbagai peristiwa yang dialami oleh masyarakat Yaman selama kurun waktu 2020 menjadi semakin parah tidak adanya infrastruktur yang tersedia akibat penghancuran oleh pihak yang berkonflik. Kemudian berlanjut dengan blokade sarana transportasi seperti pelabuhan dan bandara, serta adanya pembatasan pasokan bantuan kemanusiaan yang menjadikan kondisi masyarakat di Yaman yang menjadi korban konflik sekaligus korban terkena dampak COVID-19 semakin parah dan mengkhawatirkan.

⁵² Jeannie Sowers dan Erika Weinthal, *Humanitarian Challenges and the Targeting of Civilian Infrastructure in the Yemen War*, *International Affairs* 97, no. 1 (2021): 157–77, <https://doi.org/10.1093/ia/iiaa166>.

Apa yang terjadi pada Yaman selama masa konflik pada peristiwa *Arab Spring*, konflik internal dengan kelompok oposisi Houthi, dan ditambah adanya pandemi COVID-19 menjadikan Yaman sebagai negara mengalami krisis kemanusiaan, terlebih lagi Pemerintah Yaman yang dipimpin oleh Ali Abdullah Saleh sebelumnya yang bermasalah menjadikan permasalahan kemanusiaan di Yaman menjadi kasus yang perlu diperhatikan lebih lanjut.⁵³

Kondisi masyarakat sipil Yaman yang terkena dampak konflik sangat memprihatinkan. Banyak kasus kematian yang tercatat selama masa konflik di Yaman, pada tahun 2021, *United Nations* atau UN melalui UNDP mencatat sekitar 377.000 kematian di Yaman yang diakibatkan oleh konflik dengan kasus kematian tidak langsung seperti kelaparan dan penyakit menjadi penyebab yang paling banyak, dan lebih mengesankan lagi sekitar 70 persen dari catatan kematian tersebut berasal dari korban tewas berusia kurang dari lima tahun. Konflik antara Pemerintah Yaman dengan kelompok Houthi yang memuncak pada tahun 2014 dan adanya keterlibatan aktor luar seperti Iran dan Arab Saudi semakin memperparah kondisi masyarakat karena adanya berbagai serangan dari kedua kubu dan blokade bantuan yang mengakibatkan masyarakat sipil semakin tersudutkan. Jika konflik tersebut masih berlanjut maka dikhawatirkan pada tahun 2030 masyarakat Yaman yang meninggal dalam konflik akan mencapai angka 1.3 juta.⁵⁴

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Al Jazeera, "Yemen War Deaths Will Reach 377,000 by End of the Year: UN," *aljazeera.com*, 2021, <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/un-yemen-recovery-possible-in-one-generation-if-war-stops-now>.

Permasalahan yang dialami oleh Yaman yang bukan hanya berasal dari dalam negeri mereka, namun juga berasal dari luar negara mereka bukan hanya berdampak pada negara Yaman saja, namun juga berdampak pada negara-negara tetangga mereka, terutama negara-negara yang membantu Pemerintah Yaman sedang berkonflik dengan kelompok oposisi Houthi.⁵⁵ Bantuan kemanusiaan yang sering dikirimkan ke Yaman menjadi tertunda karena permasalahan pandemi COVID-19 pada negara sendiri-sendiri.

Permasalahan konflik internal di Yaman yang masih belum bisa diselesaikan dan adanya pandemi COVID-19 membuat konflik perpecahan lama semakin dalam, yaitu konflik sosial dan agama antara kelompok Sunni yang lebih condong mendukung Pemerintah Yaman dan kelompok Zaidis Syiah yang mendukung kelompok oposisi Houthi. Selain itu permasalahan Masyarakat Yaman yang mendiami daerah utara masih merasa bahwa Pemerintah Yaman tidak membantu mereka secara penuh. Masyarakat juga merasa tidak adanya keamanan karena merasa terancam adanya serangan dari pihak yang berkonflik dan adanya tindakan kekerasan dari pihak tertentu membuat masyarakat sipil di Yaman semakin tidak nyaman dan tertekan.⁵⁶

Hal-hal tersebut menimbulkan traumatis pada masyarakat Yaman dan membuat psikologis mereka kacau, mereka ketakutan, kelaparan,

⁵⁵ Ibid., hal. 39.

⁵⁶ Ola El Hajj Hassan et al., *Knowledge, Attitudes, and Practices toward COVID-19 Prevention in Yemen: A Community-Based Cross-Sectional Study*, *Frontiers in Public Health* 11, no. July (2023): 1–10, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1178183>.

terancam, dan melihat banyak dari mereka yang gugur oleh konflik dan wabah penyakit yang berkepanjangan.⁵⁷ Harapan akan perdamaian yang diimpikan masyarakat Yaman semakin menipis, namun masih ada asa untuk masa depan mereka menjadi lebih baik. Tantangan untuk membangun kembali sektor sosial dan ekonomi Yaman akan berat tetapi masih bisa asal semua elemen masyarakat Yaman dari penduduk sipil sampai Pemerintah Yaman mau bergotong royong untuk memulihkan negara mereka.

2.5 Keterkaitan Pemberontakan Kelompok Houthi dengan Isu Politik Regional dan Internasional

Pemberontakan dari kelompok oposisi Houthi kepada Pemerintah sah Yaman bukan hanya terkait dengan konflik skala dalam negeri Yaman saja, akan tetapi skala konflik tersebut berubah menjadi skala regional dan internasional dengan adanya aktor-aktor negara dan non-negara yang ikut terlibat dalam konflik tersebut. Keterlibatan dari para aktor luar Yaman tersebut membuat skala konflik antara Pemerintah Yaman dengan kelompok oposisi Houthi menjadi lebih luas dan kompleks.⁵⁸ Hal tersebut membuat penyelesaian konflik yang terjadi di Yaman antara Pemerintah Yaman dengan kelompok oposisi Houthi menjadi lebih susah dan memakan waktu yang cukup lama.

⁵⁷ Prashanth Ramaraj et al., *Epidemiology of Traumatically Injured Yemeni Civilians Treated at the Omani National Trauma Centre over a 2-Year Period: A Retrospective Cohort Study*, *BMJ Military Health*, September 12, 2023, e002509, <https://doi.org/10.1136/military-2023-002509>.

⁵⁸ İrem Aşkar Karakir, "ONGOING CONFLICT IN YEMEN: A PROXY WAR?," *TESAM Akademi Dergisi* 5, no. 2 (July 30, 2018): 121–49, <https://doi.org/10.30626/tesamakademi.456008>.

Dua aktor besar yang turut terlibat dalam konflik antara Pemerintah Yaman dengan kelompok oposisi Houthi adalah Iran dan Kerajaan Arab Saudi dimana kedua negara tersebut memiliki pandangan berbeda dalam menentukan sikap mereka dalam konflik tersebut. Pemerintah Iran memiliki pandangan bahwa posisi kelompok oposisi Houthi dalam konflik tersebut merupakan bentuk perjuangan kelompok Islam dalam melawan pengaruh dari barat, khususnya Amerika Serikat. Sedangkan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memandang bahwa perlawanan kelompok oposisi Houthi dalam konflik tersebut merupakan tindakan terorisme dan mengancam stabilitas regional di Kawasan Timur Tengah.⁵⁹ Kedua pandangan berbeda dari kedua negara tersebut kemudian menjadikan kedua negara tersebut saling berseberangan dalam memihak kubu pada konflik di Yaman.

Pemerintah Iran dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memiliki tujuan dan maksud yang berbeda dalam menentukan sikap mereka terhadap konflik di Yaman. Perbedaan tujuan dan maksud tersebut juga berhubungan dengan kepentingan mereka dalam konflik di Yaman yang menjadi area perebutan pengaruh mereka di Kawasan Timur Tengah. Keterlibatan kedua negara tersebut juga memperkuat isu politik regional dan internasional dalam keterkaitannya dengan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok oposisi Houthi terhadap Pemerintah Yaman karena status mereka sebagai dua negara besar di Timur Tengah dan hubungan mereka dengan

⁵⁹ Maria Maddalena Settembrini, "The Proxy War Between Iran and Saudi Arabia: The Case of the Yemeni Civil War" (Institute Universitario de Lisboa, 2019), <https://www.proquest.com/openview/9a05656e93f350f8370b9f7ba574f13c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

dunia internasional yang saling berseberangan di antara kedua negara tersebut.⁶⁰

2.5.1 Kelompok Houthi dengan Iran

Hubungan kemitraan antara kelompok oposisi Houthi dengan Pemerintah Iran dalam konflik di Yaman antara kelompok oposisi Houthi dengan Pemerintah Yaman cukup menjadikan konflik tersebut sebagai konflik dengan skala internasional dan regional karena status Iran sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh di Kawasan Timur Tengah dan adanya keterlibatan Iran dalam konflik tersebut yang mendapatkan respon dari dunia internasional, khususnya dari negara-negara barat serta posisi Iran yang mendukung kelompok oposisi Houthi membuat konflik di Yaman menjadi lebih kompleks dan rumit.⁶¹

Hubungan antara Pemerintah Iran dan kelompok oposisi Houthi mulai terjalin pada awal tahun 2000-an dan hubungan tersebut semakin menguat ketika peristiwa *Arab Spring* di Yaman berakhir dengan adanya gejolak besar di Yaman yang dimanfaatkan oleh kelompok oposisi Houthi untuk melawan Pemerintah sah Yaman. Pemerintah Iran mengirimkan banyak bantuan kepada kelompok oposisi Houthi dalam bentuk logistik maupun alat tempur militer yang sangat berguna dalam menghadapi Pemerintah sah Yaman yang dibantu oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

⁶⁰ Thomas Juneau, *Op. Cit.*, hal. 32.”

⁶¹ Afshon Ostovar, “Iran, Its Clients, and the Future of the Middle East: The Limits of Religion,” *International Affairs* 94, no. 6 (November 1, 2018): 1237–55, <https://doi.org/10.1093/ia/iyy185>.

dan koalisinya.⁶² Selain itu, Pemerintah Iran juga mengirimkan bantuan berupa pelatihan militer bagi pasukan kelompok oposisi Houthi dengan menggunakan kelompok Hizbullah sebagai perantara dalam melatih kelompok Houthi.

Pergerakan Pemerintah Iran dalam konflik di Yaman dengan membantu kelompok oposisi Houthi bukan hanya sekedar bentuk dukungan Pemerintah Iran kepada kelompok oposisi Houthi saja, akan tetapi pergerakan tersebut juga menjadi kesempatan besar bagi Pemerintah Iran untuk menekan pengaruh Kerajaan Arab Saudi di Kawasan Timur Tengah melalui kelompok oposisi Houthi. Hal tersebut bisa terjadi karena letak geografis Yaman dimana Yaman bagian Utara berbatasan langsung dengan Kerajaan Arab Saudi dan wilayah tersebut menjadi pusat komando pasukan kelompok oposisi Houthi sehingga keberadaan dari kelompok tersebut bisa mengancam langsung Kerajaan Arab Saudi dan berpotensi merusak stabilitas regional di Kawasan Timur Tengah.⁶³

Dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Iran juga mengarah pada penyebaran narasi dukungan untuk kelompok oposisi Houthi melalui media pemberitaan dimana Pemerintah Iran membantu menyalurkan narasi-narasi tersebut melalui media-media berita di Iran. Kelompok oposisi Houthi juga memiliki koneksi sendiri dengan media pemberitaan melalui media yang bernama *Al-Masirah* yang merupakan media yang dimiliki oleh kelompok

⁶² International Crisis Group (ICG), "The Huthis: From Saada to Sanaa Middle East Report N°154" (Brussels, Belgium, 2014), <http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/154-the-huthis-from-saada-to-sanaa.aspx>.

⁶³ Ibid., hal. 47.

tersebut untuk menyebarkan propaganda dan narasi mereka, khususnya mengenai pencitraan kelompok oposisi Houthi dan Pemerintah Iran sebagai pihak yang baik serta memojokkan Pemerintah Yaman dan koalisi yang dipimpin oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sebagai pihak yang jahat dalam konflik yang terjadi.⁶⁴

Hubungan yang terjalin antara kelompok oposisi Houthi dengan Pemerintah Iran mendapatkan banyak respon dari berbagai pihak internasional. Beberapa pihak yang merespon hubungan kedua kubu tersebut adalah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang melihat hubungan kelompok oposisi Houthi dengan Pemerintah Iran sebagai ancaman nyata bagi negara mereka dan berpotensi mengancam keamanan regional di Kawasan Timur Tengah sehingga harus ditangani dengan penuh, seperti melakukan intervensi militer ke Yaman pada tahun 2015.⁶⁵ Selain itu Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menyuarakan kepada dunia internasional agar Iran mendapatkan sanksi atas dukungan mereka kepada kelompok oposisi Houthi yang dianggap sebagai kelompok separatisme dan terorisme.

Selain Kerajaan Arab Saudi, beberapa negara di Kawasan Timur Tengah juga memiliki respon mereka terhadap hubungan kelompok oposisi Houthi dengan Pemerintah Iran, seperti Uni Emirat Arab yang memiliki

⁶⁴ Fahad Salem J Alghamdi, Surinderpal Kaur, and Ayesha Syed, "(De)Legitimation Strategies in the Yemeni Proxy War: Analysis of Houthi's Al Masirah Media Discourse," *Language Discourse & Society* 13, no. 1 (2025): 107–27, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15749845>.

⁶⁵ Simon Mabon, *The Struggle for Supremacy in the Middle East* (Cambridge University Press, 2023), <https://doi.org/10.1017/9781108603690>.

sikap yang sama seperti Kerajaan Arab Saudi terhadap hubungan kedua kubu tersebut dimana Pemerintah Uni Emirat Arab bergabung dengan koalisi Arab untuk melakukan intervensi militer ke Yaman tahun 2015 dan meskipun Pemerintah Uni Emirat Arab menarik sebagian besar pasukannya di Yaman pada tahun 2019, mereka masih terlibat dengan kelompok-kelompok tertentu di Yaman yang melawan kelompok Houthi melalui sektor politik dan ekonomi.⁶⁶

Qatar pada awal awal konflik di Yaman kembali memanas pada tahun 2015 sempat bergabung dengan Koalisi Arab untuk melakukan intervensi militer ke Yaman, namun setelah peristiwa Diplomasi Krisis yang dialami oleh Qatar pada tahun 2017 membuat Qatar mengambil sikap netral terhadap konflik di Yaman. Sikap netral juga dilakukan oleh Oman dengan menjadi mediator bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik di Yaman antara Pemerintah sah Yaman dengan Kelompok oposisi Houthi karena Pemerintah Oman memandang bahwa perdamaian di Yaman merupakan salah satu bagian dari kepentingan nasional mereka sehingga penyelesaian konflik secara diplomatik diperlukan dalam konflik tersebut.⁶⁷

Pemerintah Amerika Serikat memiliki pandangan yang cukup kritis terkait dengan hubungan kelompok oposisi Houthi dengan Pemerintah Iran

⁶⁶ Riskiansyah Ramadhah, Syaiful Rohman, and Imam Khomaeni Hayatullah, "Devide Et Impera: The United Arab Emirates' Strategic Policy In Yemen," *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 8, no. 2 (December 25, 2021), <https://doi.org/10.7454/meis.v8i2.136>.

⁶⁷ Abdullah Baabood and Ahmed Baabood, "Omani and Qatari Roles in the Yemen Crisis," in *Global, Regional, and Local Dynamics in the Yemen Crisis*, ed. Stephen W Day and Noel Brehony (Cham: Springer International Publishing, 2020), 165–78, https://doi.org/10.1007/978-3-030-35578-4_11.

dimana mereka memandang hubungan kedua kubu tersebut menyebabkan ketidakstabilan di Kawasan Timur Tengah karena Pemerintah Amerika Serikat menganggap kelompok oposisi Houthi sebagai kelompok separatisme dan organisasi teroris asing serta Iran yang membantu kelompok tersebut dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.⁶⁸

Berbeda dengan Amerika Serikat, sebagian besar aktor internasional seperti Uni Eropa, PBB, dan beberapa negara lainnya mengambil sikap netral terhadap hubungan kelompok oposisi Houthi dengan Pemerintah Iran dan menekankan pendekatan diplomatik untuk menyelesaikan konflik di Yaman.⁶⁹

2.5.2 Kelompok Houthi dengan Arab Saudi

Pergerakan kelompok oposisi Houthi di Yaman membuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi merasa terancam. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa faktor yang membuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi merasakan ancaman tersebut dan dari perasaan terancam tersebut juga membuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memiliki alasan logis menurut mereka untuk terlibat dalam konflik di Yaman. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menganggap pergerakan kelompok oposisi Houthi di Yaman merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional negara mereka dan berpotensi menjadi ancaman besar terhadap kestabilan regional Kawasan

⁶⁸ Muhammad Ahmad and Haleema Ali Khawaja, "US Role in Yemen Conflict : Implications for Regional Stability and Global Leadership," *Pakistan Social Sciences Review* 9, no. 2 (2025): 1–10, [https://doi.org/https://doi.org/10.35484/pssr.2025\(9-II\)29](https://doi.org/https://doi.org/10.35484/pssr.2025(9-II)29).

⁶⁹ International Crisis Group, "Rethinking Peace in Yemen," *Icg* (Brussels, Belgium, 2020), <https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/216-rethinking-peace-in-yemen.pdf>.

Timur Tengah sehingga kelompok tersebut perlu ditangani dengan serius agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.⁷⁰

Lokasi geografis Yaman dan Kerajaan Arab Saudi menjadi salah satu faktor yang membuat Pemerintah Kerajaan Arab Saudi merasa terancam dengan pergerakan kelompok oposisi Houthi karena kedua negara tersebut berbatasan langsung. Selain itu, markas utama dari kelompok oposisi Houthi berada di kota Saada, wilayah Yaman bagian utara yang berbatasan langsung dengan wilayah Kerajaan Arab Saudi bagian selatan sehingga kelompok tersebut sering melakukan serangan ke wilayah Kerajaan Arab Saudi, khususnya setelah intervensi militer oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tahun 2015.⁷¹

Kemitraan antara kelompok Houthi dan Pemerintah Iran menjadi salah satu alasan utama kekhawatiran Arab Saudi terhadap pergerakan Houthi. Sebagai negara besar penganut Syiah, Iran dianggap rival oleh Arab Saudi yang beraliran Sunni, sehingga merasa terancam jika Yaman dikuasai Houthi dan menjadi perpanjangan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah.⁷² Rasa terancam yang dirasakan oleh Pemerintah Arab Saudi mendorong munculnya kepentingan nasional dalam konflik Yaman, yaitu mencegah kelompok Houthi dan sekutunya menguasai wilayah tersebut, terutama area strategis yang penting bagi sektor ekonomi, serta menjaga

⁷⁰ May Darwich, "The Saudi Intervention in Yemen: Struggling for Status," *Insight Turkey* 20, no. 2 (2018): 142, <http://www.jstor.org/stable/26390311>.

⁷¹ Khaldon Ahmed Abdulla and Jatswan Singh Harnam Singh, "The Influence of Geography in Asymmetric Conflicts in Narrow Seas and the Houthi Insurgency in Yemen," *Malaysian Journal of International Relations* 6, no. 1 (2018): 84–90, <https://doi.org/10.22452/mjir.vol6no1.7>.

⁷² Thomas Juneau, *Op., Cit.*, hal 32."

stabilitas Yaman agar tidak berada di bawah pengaruh Houthi dan Iran yang dianggap sebagai musuh Kerajaan.⁷³ Menurut Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, kepentingan nasional mereka dalam konflik di Yaman juga berkaitan dengan menjaga kestabilan regional di Kawasan Timur Tengah.

Pergerakan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi di Yaman untuk menekan kelompok oposisi Houthi didukung oleh beberapa negara Barat seperti Inggris dan Amerika Serikat dimana kedua negara tersebut sering membantu Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan mengirimkan amunisi senjata dan menggelar pelatihan militer bersama. Pemerintahan Amerika Serikat pada masa Donald Trump memiliki kebijakan yang cukup keras untuk mengatasi konflik yang terjadi di Yaman, beberapa kebijakan tersebut meliputi penjualan senjata ke Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan memasukkan kelompok oposisi Houthi dalam daftar *Foreign Terrorist Organization* atau disingkat FTO dimana dua kebijakan tersebut ditujukan untuk menekan kelompok Houthi dan pengaruh Iran di Kawasan Timur Tengah.⁷⁴

Pemerintah Amerika Serikat pada masa Donald Trump menilai bahwa pergerakan dari kelompok oposisi Houthi cukup berbahaya bagi mereka karena kelompok tersebut berhasil menguasai sebagian wilayah barat dari Yaman yang merupakan jalur perekonomian internasional sehingga dikhawatirkan perekonomian internasional akan mengalami

⁷³ Khaldon Ahmed Abdulla and Jatswan Harnam Singh, *Op., Cit*, hal. 51.”

⁷⁴ Mahmoud Saleh Al Shawhati, “Impact of the United States Policy in Supporting the Saudi War in Yemen during the Term of the Trump Administration and the Joe Biden Administration” (San Fransisco State University, 2023).

hambatan dan wilayah tersebut dimanfaatkan oleh kelompok Houthi sebagai sumber daya bagi kelompok mereka sendiri, kekhawatiran dari Pemerintah Amerika Serikat semakin kuat karena kelompok Houthi juga menjalin kemitraan dengan Iran yang musuh Amerika Serikat. Oleh karena itu, tindakan militer dianggap perlu untuk menekan kelompok tersebut.⁷⁵



⁷⁵ Ibid.